

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELAYANAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PADA KAWASAN PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan)

Oleh

ELIZABETH DITALINI. S

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang baru dicanangkan pada tahun 2011 di salah satu Kelurahan Pesisir yang berada di Kota Bandar Lampung yaitu Kelurahan Bumi Waras, memunculkan persoalan yakni adanya pengindikasian bahwa bantuan PKH tidak tepat sasaran karena ditemukan ada ketimpangan data antara jumlah keluarga Pra Sejahtera dengan jumlah penerima bantuan PKH tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi pelaksanaan serta kendala-kendala yang dihadapi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) kawasan pesisir Kota Bandar Lampung di Kelurahan Bumi Waras.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu memaparkan dan menggambarkan selengkap mungkin suatu keadaan yang berlaku ditempat tertentu di masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik *purpose sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria tertentu, dengan mengambil sampel beberapa informan yakni Koordinator LSM JPrP Kota Bandar Lampung, Ketua Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Bandar Lampung dan Kecamatan Teluk Betung Selatan, Lurah Kelurahan Bumi Waras, Pendamping PKH Kelurahan Bumi Waras, serta beberapa warga Kelurahan Bumi Waras.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan dan kesehatan cukup baik, walaupun masih ditemui adanya kepentingan individu dari petugas Kelurahan. Namun, karena memang kebijakan PKH harus dimulai pada tahun 2011, membuat tidak semua keluarga sangat miskin memperoleh bantuan PKH, data yang digunakan dinilai tidak *valid* karena berfokus pada data BPS tahun 2008. Selain itu juga, sosialisasi kebijakan PKH ini dinilai tidak merata, hanya difokuskan pada peserta PKH saja, jadi sebagian besar warga Kelurahan Bumi Waras tidak mengetahui tentang adanya kebijakan PKH ini.

Untuk konsep pengelolaan ke depan, ada baiknya Tim UPPKH, terutama Pendamping untuk berkoordinasi dengan Lurah dan Ketua-Ketua RT dalam menentukan siapa saja warga yang berhak mendapatkan bantuan, serta sebagai sarana sosialisasi kepada warga. Pendataan ulang juga perlu dilakukan mengingat tidak semua warga dari keluarga sangat miskin tidak memperoleh bantuan PKH. Selain itu, ada baiknya juga agar sosialisasi dilakukan secara menyeluruh agar semua warga mengetahui kebijakan PKH ini.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, PKH